



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN TA 2023	REALISASI TA 2023	(%)	REALISASI TA 2022
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.a.				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1)	32.053.400.012,00	30.365.234.539,14	94,73	27.051.566.275,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2)	22.695.744.856,00	8.824.184.725,05	38,88	6.281.331.842,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3)	5.420.317.484,00	4.233.776.476,00	78,11	4.278.586.226,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.a.4)	55.968.864.931,00	58.183.570.853,71	103,96	38.283.481.036,88
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (3 s/d 6)		116.138.327.293,00	101.606.768.593,90	87,49	75.894.966.379,88
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.b				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.b.1)				
10	Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1)a)	8.804.047.000,00	10.318.140.430,00	117,20	15.090.695.529,00
11	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.b.1)b)	9.727.473.000,00	9.737.619.475,00	100,10	2.501.387.515,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.b.1)c)	617.405.396.000,00	621.340.591.953,00	100,64	591.973.896.010,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.b.1)d)	261.581.867.000,00	256.545.824.857,00	98,07	190.949.177.798,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10 s/d 13)		897.518.783.000,00	897.942.176.715,00	100,05	800.516.156.862,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.b.2)				
16	Dana Insentif Daerah (DID)		10.176.284.000,00	10.176.284.000,00	100,00	20.428.056.000,00
17	Dana Desa		85.572.902.000,00	85.572.902.000,00	100,00	75.523.424.200,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 17)		95.749.186.000,00	95.749.186.000,00	100,00	95.951.480.200,00
19	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1.b.3)				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.3)a)	46.682.955.035,00	46.628.150.786,00	95,78	44.031.581.291,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (20)		46.682.955.035,00	46.628.150.786,00	95,78	44.031.581.291,00
22	Bantuan Keuangan	5.1.1.b.4)				
23	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	5.1.1.b.4)a)	9.640.000.000,00	6.420.000.000,00	66,60	18.503.062.400,00
24	Jumlah Bantuan Keuangan (23)		9.640.000.000,00	6.420.000.000,00	66,60	18.503.062.400,00
25	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14 + 18 +21 + 24)		1.051.590.924.035,00	1.046.739.513.501,00	99,54	859.001.280.743,00
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.c				
27	Pendapatan Hibah	5.1.1.c.1)	3.842.000.000,00	48.642.558.839,00	1.266,07	1.708.000.000,00
28	Pendapatan Lainnya	5.1.1.c.2)	44.881.560.000,00	-	0,00	39.650.788.853,00
29	Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (27 s/d 28)		46.723.560.000,00	48.642.558.839,00	99,83	41.358.788.853,00
30	TOTAL PENDAPATAN (7 + 25 +29)		1.216.452.811.328,00	1.196.988.838.933,90	98,40	1.076.255.034.975,88
31	BELANJA	5.1.2				
32	BELANJA OPERASI	5.1.2.a				
33	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1)	452.078.055.030,00	424.150.602.261,00	93,82	421.016.707.358,69
34	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2)	340.201.557.570,00	321.947.512.168,00	94,63	314.644.292.766,58
35	Belanja Hibah	5.1.2.a.3)	38.875.335.786,00	22.090.349.472,00	56,82	13.202.812.837,00
36	JUMLAH BELANJA OPERASI (33 s/d 36)		831.154.948.386,00	768.188.463.901,00	92,42	748.863.812.962,27
37	BELANJA MODAL	5.1.2.b				
38	Belanja Modal Tanah	5.1.2.b.1)	908.361.248,00	108.925.000,00	21,43	284.384.740,00
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.b.2)	63.917.026.815,00	60.370.283.235,00	94,45	47.931.270.557,00
40	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.b.3)	129.871.509.435,00	111.326.417.318,00	85,72	76.161.116.859,00
41	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.b.4)	83.212.871.898,00	66.188.909.423,00	79,52	79.425.537.435,00
42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b.5)	5.278.014.050,00	5.569.398.050,00	105,52	5.748.167.149,00
43	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.b.6)	147.600.000,00	147.180.908,00	99,72	-
44	JUMLAH BELANJA MODAL (38 s/d 43)		282.935.383.446,00	243.691.113.934,00	86,13	209.550.476.740,00
45	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.c				
46	Belanja Tak Terduga	5.1.2.c.1)	500.000.000,00	41.258.973,00	8,25	323.527.897,00
47	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (46)		500.000.000,00	41.258.973,00	8,25	323.527.897,00
48	TOTAL BELANJA (36 + 44 +47)		1.114.590.331.832,00	1.011.920.836.808,00	90,79	958.737.817.599,27
49	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.2.d				
50	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.d.1)	5.846.331.012,00	3.959.920.458,00	67,73	2.784.133.154,00
51	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.d.2)	148.733.636.540,00	148.685.153.601,00	99,97	136.416.040.919,00
52	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN (50 s/d 51)		154.579.967.552,00	152.645.074.059,00	98,75	139.200.174.073,00
53	TOTAL TRANSFER (52)		154.579.967.552,00	152.645.074.059,00	98,75	139.200.174.073,00
54	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (48 + 53)		1.269.170.299.384,00	1.164.565.910.867,00	91,76	1.097.937.991.672,27
55	SURPLUS / (DEFISIT) (30 -54)	5.1.3	- 52.717.488.056,00	32.422.928.066,90	(61,50)	- 21.682.956.696,39
56	PEMBIAYAAN					
57	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4				
58	Penggunaan SILPA	5.1.4.a	56.717.488.056,00	56.665.186.379,14	99,91	78.400.444.754,53
59	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (58)		56.717.488.056,00	56.665.186.379,14	99,91	78.400.444.754,53
60	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5				
61	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (61)		4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	-
62	PEMBIAYAAN NETTO (59 - 61)	5.1.6	52.717.488.056,00	52.665.186.379,14	99,90	78.400.444.754,53
63	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (55 + 62)	5.1.7	-	85.088.114.446,04		56.717.488.058,14

Mamuju, 13 Mei 2024
 Bupati Mamuju,

 H. SIFA SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si

"Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini"



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Mamuju bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Mamuju. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

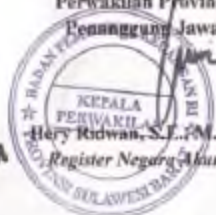
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian interni dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 09.B/LHP/XIX.MAM/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Mamuju, 14 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Panggung Jawab Pemeriksaan,



Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Muntan No. RNA-6054